

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)



Ilustrasi digital (SHUTTERSTOCK)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin

DISRUPSI

PEMERINTAHAN & POLITIK

ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Demastuti | Arizka Warganegara | Ody Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DISRUPSI PEMERINTAHAN DAN POLITIK ERA 4.0
(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Penulis:

Ari Darmastuti, Arizka Warga negara, Andy Corry Wardhani,
Budi Kurniawan, Dedy Hermawan, Maulana Mukhlis,
Robi Cahyadi kurniawan, Simon S. Hutagalung,
Syamsul Ma'arif, Syafarudin

Editor :

Syafarudin, Maulana Mukhlis

Desain Cover & Layout
PusakaMedia Design

Distributor

Komunitas Bisnis FISIP

xiv + 199 hal : 14 x 21 cm
Cetakan April 2020

ISBN: 978-623-7560-71-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Bekerjasama dengan:

FISIP Universitas Lampung

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Pengantar Editor

Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja disrupsi itu bisa parsial atau ada yang dirasakan sudah menjadi disrupsi total atau fundamental. Gelombang disrupsi telah mewarnai segala aspek kehidupan warga (seperti di dunia bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di hampir tiap negara di dunia.

Disrupsi yang dipantik revolusi industri 4.0 ini, bila dilihat dari sejarah satu dasawarsa yang lalu kala ada pertemuan *Hannover Fair* Jerman 2011 dan dilanjutkan 2012 muncul rekomendasi *Working Group industry 4.0*. Itu semua berawal dari tuntutan, keinginan, dan kebutuhan warga dunia untuk memperoleh produk dan jasa yang *smart product* (efektif, efisien, dan multi fungsi) melalui *smart factory*.

Revolusi industri pada tahap ke-empat (era 4.0) ini adalah sebuah kondisi pada abad ke-21, ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antardunia fisik, digital, dan biologi.

Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, *internet of things*, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak semisal *drone*.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat dimata *netizen* berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat diseluruh dunia.

Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, bila revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi *robotic*.

Revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan keinginan masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa kekerasan dan atau melalui kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sebuah perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Menurut Prof. Schwab, dunia mengalami empat gelombang revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar.

Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan mesin uap. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran massal.

Ditemukan energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.

Energy listrik telah mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan *Programmable Logic Controller (PLC)* atau sistem otomatisasi berbasis computer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya file digital.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara onlinen (Ahmad Yusril Wafi, 2019).

Sebagai sebuah proses yang berputar cepat maka dampak revolusi industry tidak langsung menimbulkan disrupsi total, tapi umumnya diawali adanya proses-proses *self disruption*, peristiwa, kasus awal, yang mengandung patologi, hambatan, dan tantangan Seperti pelapukan pada lambung kapal yang tengah melayari samudera luas memuat ramai penumpang. Menyadari bahaya pelapukan tersebut lalu memantik orang mencatat, menyampaikan inisiasi, kreasi, dan inovasi agar terjadinya perbaikan (*recovery*) atau pergantian pendekatan, cara berpikir, cari bertindak, dari cara-cara lama menjadi pola-pola baru.

Akademisi kampus yang mengemban misi tri dharma senantiasa rajin mencatat, meneliti, mengkritisi, dan memberikan gagasan alternatif atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kasus yang menjadi perhatian publik di media massa (baik media lokal, nasional, berbahasa Indonesia dan english, berbasis cetak atau online).

Bunga rampai akademisi ini berupaya mencatat, mengkritisi, mengulas aneka dinamika di lingkup pemerintahan dan politik yang terjadi dalam satu dasarwa. Hal itu bisa dilihat pada bagian pertama dinamika pemerintahan dan bagian kedua dinamika politik.

Akademisi sudah mengingatkan sejak dulu hingga saat ini bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis, kampus, dan warga) itu berfokus melakukan persaingan kreativitas dan inovasi. Resep agar bersaing menciptakan sumber daya yang kreatif dan inovatif ini distimulan dari hasil riset world bank (1995) terhadap 150 negara di dunia bahwa keunggulan sebuah negara ditentukan dari kontribusi natural resources (10%), technology (20%), networking (25%), dan kontribusi yang terbesar adalah kemampuan sumber daya bangsa menciptakan *innovation& creativity* (45%). Jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah kelola tanpa *value added* maka bangsa tersebut siap-siap menjadi bangsa pinggiran.

Sayangnya upaya merintis inovasi-inovasi di daerah dan nusantara dihadapkan pada 5 (lima) anomali atau problem besar yakni (1) korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya meski berkali terjadi OTT KPK; (2) ada upaya menarik birokrasi dari sudut netral ke berpihak kepada kandidat atau incumben ini tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat; (3) pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (*high cost politic*); (4)

swasta (pasar) dibantu media kadang mengambil alih peran instansi pemerintah yang gaptek (gagap teknologi) dan lembaga sampiran negara yang lelet. Pasar misalnya memotong red type lewat aksi *live quick count*, dan biro jasa pengurusan administrasi publik; (5) masih banyak pembangunan diskontinu atau dilanjutkan setengah hati oleh elite penerus. Ganti pemimpin, maka gantilah kebijakan.

Alhamdulillah, generasi milenial sebagai gerbong depan bonus demografi era mendatang (era Indonesia emas) merasakan disrupsi pemerintahan dan politik berbasis teknologi 4.0. di nusantara baru langkah awal dari undakan tangga yang banyak dan tinggi. Para milenial optimis—di tengah munculnya pandemi covid-19 di dua pertiga negara dunia sebagai *trigger* baru disrupsi global—mereka yakin akan sanggup melakukan perubahan yang lebih baik lagi kelak.

Bandar Lampung, April 2020

Salam,

Editor

How to Read This Book

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi. Masih ada perdebatan "dimana batas garis demarkasi internal" tatkala bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka di dalamnya termasuk konsepsi pemerintahan.

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel buku ini di bagian pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika politik, semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di pinggir lapangan sepak bola.

Selamat membaca. Gol dan Merdeka!

Daftar Isi

Pengantar Editor	v
How to Read This Book	x
Daftar Isi	xi

BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA PEMERINTAHAN

1. Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan Budi kurniawan	2
2. Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah Simon S. Hutagalung	7
3. Honorer dalam Pusaran Disrupsi dan Efisiensi Maulana Mukhlis	14
4. Politik Birokrasi dan Rekrutmen CPNS Simon S. Hutagalung	20
5. Kreatifitas dan Inovasi Birokrasi Era 4.0 Syafarudin	24
6. Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Maulana Mukhlis	28
7. Reformasi Birokrasi di Simpang Jalan Simon S. Hutagalung	32
8. Terminal Agribisnis Lampung, Apa Kabarmu? Syafarudin	36

9. Diskontinu atau Lanjutkan?	
Syafarudin	41
10. Bad Governance dalam Penarikan BPHTB	
Dedy Hermawan	46
11. Mereview Kebijakan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung	
Dedy Hermawan	52
12. Kolaborasi dalam Tata Kelola Bencana	
Maulana Mukhlis	57
13. Alasan Bandarnegara dan Corona	
Syafarudin	64
14. Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah	
Arizka Warganegara	69
15. Partisipasi Pemilih Versus Administrasi Pemilu	
Robi Cahyadi kurniawan	73
16. Pilkada, Dilema Pilihan Birokrasi	
Simon S. Hutagalung	79
17. Pilkada dan Netralitas Birokrasi	
Maulana Mukhlis	85
18. Kiprah Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK bagi Masyarakat Lampung	
Dedy Hermawan	90
19. Arinal dan Jokowi Milad, Pejabat Beriklan Beretikalah	
Syafarudin	97

BAGIAN KEDUA: DINAMIKA POLITIK

1. Quick Count dan Relevansi Pengaturannya Pada Pilpres : Belajar dari Sejarah Pilpres Ari darmastuti	103
2. Penyadapan Australia dan Sikap Kita Budi Kurniawan	109
3. Komunikasi Politik di Era Revolusi Industri 4.0 Andy Corry Wardhani	113
4. Masalah Demokrasi Pilgub Lampung 2018 Robi Cahyadi kurniawan	118
5. Pemuda dan Kepemimpinan Pemuda Simon S. Hutagalung	123
6. Perempuan dalam Pemilu 2019 Robi Cahyadi kurniawan	128
7. Media dan Pilkada Robi Cahyadi kurniawan	134
8. Boneka Pilgub dan Cukong Bahayakan Lampung Syafarudin	139
9. Politisi Cai Bucai: KGB, MEOK dan Raja Olah Syafarudin	145
10. Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung Arizka Warganegara	148
11. Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden Arizka Warganegara	152
12. Mengapa KPK Hadir? Budi kurniawan	157
13. Democracy and Corruption in Indonesia Budi kurniawan	161
14. Kabinet Presidensial di Tengah Sistem Multipartai Syamsul Ma'arif	164

15. Seputar Maraknya Wabah Korupsi	
Syamsul Ma'arif	170
16. Budaya Permisif Pemilih	
Robi Cahyadi kurniawan	174
17. Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu	
Robi Cahyadi kurniawan	179
18. Korupsi : Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?	
Syafarudin	184
Biodata Penulis	188
Biodata Editor	197

Kabinet Presidensial Di Tengah Sistem multipartai

SYAMSUL MA'ARIF /Media lampost.co

Agenda pertama pasca Pemilu terutama berkaitan dengan pembentukan pemerintahan baru. Di tengah berlangsungnya sistem multipartai, seorang calon presiden dari suatu partai sulit bisa meraih mayoritas mutlak jika tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Maka kemenangan seorang calon presiden akan ia bayar dengan cara berbagi kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya.

Secara luas kekuasaan pemerintahan mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian porsi kekuasaan di lingkungan lembaga legislatif relatif tidak menemui hambatan yang berarti karena umumnya berlangsung atas kompromi antar fraksi di parlemen. Begitu pula pengisian jabatan ketua dan hakim-hakin agung di lembaga yudikatif umumnya tinggal menunggu hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif.

Pembagian porsi kekuasaan akan menemui titik krusial tatkala berlangsung di lembaga eksekutif. Penentuan personil ke jabatan menteri-menteri kabinet akan diwarnai tarik-menarik kepentingan antar partai politik sehingga kompetisi memperebutkan jabatan di cabinet sesungguhnya merupakan medan pertarungan berikutnya setelah memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden.

Dapat dikatakan bahwa *struggle for power* sesungguhnya tersentral di lembaga eksekutif. Bahkan jabatan-jabatan eksekutif terkesan lebih prestisius ketimbang jabatan legislatif dan yudkatif. Hal ini lantaran lembaga eksekutif didukung jaringan infrastruktur organisasi hingga ke lapisan *grass root* serta ditopang control yang kuat atas penguasaan sumber-sumber daya. Melalui posisinya di lembaga eksekutif itulah partai politik berkesempatan mewujudkan program yang menjadi platform perjuangan partainya.

Situasi tersebut sesungguhnya menimbulkan semacam kontradiksi. Secara yuridis konstitusional Pasal 17 (4) UUD 1945 hasil amandemen memberi presiden hak prerogratif mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Apa pun yang diambil presiden sesungguhnya tak dapat diintervensi oleh siapa pun termasuk partai-partai politik di parlemen. Namun di tengah sistem multipartai, presiden merasa perlu mengamankan pemerintahannya dengan mengakomodasi partai-partai politik ke dalam semacam kabinet koalisi kendati sistem presidensial yang dianut tidak mengenal istilah kabinet koalisi.

Bisa saja atas alasan konstitusi, presiden melangkah sendirian. Namun pengalaman Presiden Wahid menunjukkan betapa ia menjadi sasaran empuk parlemen tatkala secara sepihak ia memberhentikan, *mereshuffle*, membubarkan departemen, dan mengangkat menteri-menteri kabinet. Kenyataan itu tampak dari digunakannya hak interpelasi parlemen. Disamping itu Sidang Tahunan MPR benar-benar digunakan mengkritisi habis-habisan *progress report* presiden. Karena itu jatuhnya Presiden Wahid oleh skandal Bruneigate dan Bulogate tak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan sebelumnya yang diambil presiden.

Presidensial dan Parleментар

Pemerintahan yang demokratis umumnya menganut salah satu dari dua sistem kabinet presidensial atau parlementer.

Sistem presidensial mendasarkan kekuasaan ada pada presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogratif mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Dalam sistem ini kedudukan presiden dan DPR sederajat dimana presiden tak bertanggungjawab kepada DPR. Meski demikian, presiden wajib memberi jawab atas pertanyaan DPR.

Sistem parlementer mendasarkan diri pada kekuasaan partai-partai politik di DPR. Para menteri kabinet berasal dari partai-partai politik yang pengangkatannya harus mendapatkan persetujuan DPR. Dalam sistem ini, DPR berhak meminta pertanggungjawaban kepala pemerintahan, bahkan bisa menjatuhkannya sewaktu-waktu. Jika timbul mosi tidak percaya sejumlah anggota DPR, tanda-tanda jatuhnya pemerintahan hampir pasti hingga akhirnya pemerintahan benar-benar jatuh.

Menurut Austin Ranny dalam *Governing, Introduction to Political Science* (1996), 110 negara di dunia kini menganut parlementer, sedangkan 15 lainnya menganut presidensial. Walaupun begitu, dalam pelaksanaannya timbul pula perpaduan keduanya yang disebut presidensial semi parlementer. Sistem inilah yang dianut di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, presiden tak diangkat dan bertanggungjawab kepada Konggres, melainkan dipilih oleh rakyat. Dalam penyusunan kabinet, pengangkatan menteri dimintakan persetujuan Konggres. Selain itu, Konggres bisa melakukan impeachment jika presiden terbukti melakukan kesalahan fatal.

Upaya perubahan sistem kabinet pernah ditempuh di Brazil April 1993. Melalui referendym nasional, rakyat Brazil dimintakan pendapat apakah mau etap dengan sistem presidensial ataukah meimilih parlementer. Hasilnya 61% memilih tetep presidensial dan hanya 39% yang memilih parlementer.

Sejalan dengan sistem multipartai, Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer pada tahun 1945-1959. Namun sistem ini dituding menjadi baing instabilitas lantaran

pemerintahan lebih sering diwarnai jatuh bangunnya kabinet dalam waktu singkat. Sebagian pihak berpendapat hal itu lantaran kondisi suprastruktur, infrastruktur, dan kultur politik saat itu memang belum siap. Itulah kenapa kemudian Soekarno mengakhirinya lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun ketika sistem presidensial berlaku, sejumlah ekkses pun timbul. Sistem ini mengasumsikan pihak yang berkuasa memegang posisi mayoritas. Untuk itulah dilakukan *political engineering* yang menempatkan penguasa dan kekuatan politik penguasa pada posisi dominan.

Pada era Soekarno, *political engineering* ditempuh dengan menempatkan tiga pilar Nasakom (PNI, NU, PKI) sebagai kekuatan dominan. Pada era Soeharto, langkah serupa ditempuh dengan menempatkan Golkar sebagai partai dominan. Dengan langkah itu, pemerintahan Soeharto mampu mencapai stabilitas 32 tahun lamanya tanpa terusik PPP dan PDI. Namun stabilitas yang lama tak ubahnya stabilitas semu lantaran tercipta secara paksa. Tak heran tatkala rezim soeharto mengalami deligitimasi, pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie mengubah strategi dengan mengakomodasi PPP dan PDI ke dalam kabinet.

Akuntabilitas Publik

Dilemma memilih presidensial atau parlementer kini lebih merupakan kepentingan elite ketimbang massa. Apa pun sistemnya akan diterima massa sepanjang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Tinggal sekarang ketegasan elite politik menentukan sikap apakah mau tetap presidensial ataukah beralih ke parlementer.

Di atas kertas sistem parlementer amat relevan dengan konteks kehidupan multipartai. Dengan menganut parlementer, orientasi perjuangan partai menjadi jelas yakni meraih jabatan di lingkungan pemerintahan. Pilihan ke arah parlementer kini amat terbuka, karena pada era reformasi kini perombakan konstitusi

merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dapat dilakukan. Persoalannya, proses amendemen konstitusi tak mungkin berlangsung dalam waktu dekat. Pilihan satu-satunya dalam waktu dekat ini adalah konsisten menggunakan sistem presidensial. Di sinilah presiden terpilih harus berani sepenuhnya menggunakan hak prerogratifnya mengangkat figure-figur yang layak menjadi menteri.

Kekhawatiran bakal melemahnya dukungan parlemen seperti semasa Presiden Wahid sesungguhnya dapat diantisipasi jika penyusunan kabinet berpegang pada prinsip akuntabilitas publik. Prinsip ini mengharuskan presiden mempertanggungjawabkan tindakannya ke publik. Konsekuensinya, selaku pejabat publik presiden harus tetap menjamin transparansi kebijakannya kepada publik. Menurut Samuel Paul, setidaknya ada tiga jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi. Pertama, akuntabilitas demokratis. Prinsip ini mengharuskan presiden meyakinkan publik bahwa kabinetnya berisi figure-figur yang dapat diterima oleh publik. Langkah ini bertujuan meraih kepercayaan publik. Ketidakmampuan menempatkan figur yang diterima publik bukan saja akan menimbulkan konflik politik, melainkan pula akan melahirkan reaksi negatif dari pasar yang berpengaruh atas kinerja ekonomi makro. Harus dipahami, reaksi positif dari pasar berupa menguatnya nilai rupiah dan IHSG di BEJ barulah merupakan reaksi awal yang bersifat emosional dan hanya berpengaruh pada sebagian variabel moneter. Reaksi yang rasional di sektor riil seperti bergairahnya kembali kegiatan investasi barulah akan terlihat beberapa bulan ke depan.

Prinsip kedua adalah akuntabilitas legal. Prinsip ini mengharuskan agar pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian selalu berpegang pada undang-undang sesuai Pasal 17 (4) UUD 1945. Prinsip ini tak berarti presiden bisa berbuat semaunya sendiri dengan alasan undang-undang belum lahir,

karena semangat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah pesan bagi presiden untuk selalu mengindahkan suara publik.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas profesional. Prinsip ini mengharuskan presiden menempatkan orang-orang secara profesional sesuai standar profesi. Ini tak berarti kader partai tak boleh duduk di kabinet. Mereka pun layak diberi kesempatan sepanjang memenuhi kriteria ahli di bidangnya. Di samping itu, presiden harus mampu meyakinkan publik bahwa kabinetnya kompak, terintegrasi, tak menginduk ke partai, apalagi berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks *recovery* nasional, pemerintahan hasil pemilu mengalami kondisi yang hampir mirip periode awal pemerintahan Soeharto. Secara politik, pemerintahan Soeharto menghadapi instabilitas keamanan yang cukup rawan. Secara ekonomi, pemerintahan mewarisi deficit APBN yang cukup besar, utang luar negeri yang menumpuk, cadangan devisa yang menipis, kinerja ekspor rendah, inflasi tinggi, dan rendahnya kapasitas produksi.

Akhirnya publik berharap pemerintahan hasil pemilu tidak gagal. Apa pun sistemnya harus mampu mendukung proses pemulihan. Oleh karena itu, penyusunan kabinet harus mencerminkan komposisi yang serasi agar mampu mengatasi problem ekonomi dan politik yang kini amat mendesak diprioritaskan. ●●●